KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Malang Tahun 2018 dapat diselesaikan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan LAKIP ini.Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LAKIP Bakesbangpol Kota Malang.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pemberdayaan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Sosial Masyarakat dan Pembangunan bidang IPOLEKSOSBUD secara terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait serta masyarakat dalam rangka melaksanakan Pembangunan yang berkesinambungan, demokratis, partisipatif, harmonis, berkeadilan dan beradab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam rangka pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam menumbuhkan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis dan transparan yang berbasis pada partisipasi aktif, kreatif, dan kemandirian masyarakat dengan dasar moral dan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Malang,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Malang

Drs. SUPRIYADI, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19591220 198803 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam upaya tersebut Bakesbangpol Kota Malang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bahan evaluasi kerja / kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018 yang meliputi :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5. Penyediaan makanan dan minuman
6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
7. Peringatan / Kegiatan Insidentil
8. Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip
9. Pengadaan peralatan gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional
11. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
12. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
13. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14. Penyusunan / Reviu Renstra
15. Penyusunan laporan keuangan
16. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
17. Meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mengikuti upacara hari-hari besar Nasional
18. Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan
19. Fasilitasi kader bela Negara
20. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
21. Pembinaan Penghayat Kepercayaan
22. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba
23. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
24. Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental
25. Pemantapan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia
26. Fasilitasi bantuan keuangan parpol
27. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu
28. Fasilitasi pendidikan politik bagi generasi muda
29. Peningkatan kapasitas Ormas dan LSM
30. Fasilitasi Kominda

31. Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
32. Fasilitasi FORKOPIMDA
33. Pemantauan orang asing, NGO, Mahasiswa dan Lembaga Asing
34. Pemantauan tempat umum pada hari besar
35. Penanganan gangguan konflik sosial

Malang,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Malang

Drs. SUPRIYADI, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19591220 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
RINGKASAN EKSEKUTIF 2
DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN **6**
A. Latar Belakang 6
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 8
C. Struktur Organisasi 10
D. Sistematika Penyajian 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA **12**
A. RPJMD Tahun 2013-2018 12
B. Rencana Strategis 2013-2018 13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **17**
A. Penguatan Implementasi SAKIP 17
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 17
C. Analisis Pencapaian Kinerja 20
D. Akuntabilitas Keuangan 40

BAB IV PENUTUP **45**
A. Kesimpulan 45
B. Saran 45

Daftar Tabel

2.1 Indikator Kinerja 15
2.2 Perjanjian Kinerja 16
3.1 Tabel Perhitungan Realisasi Kinerja 17
3.2 Capaian Kinerja Bakesbangpol Kota Malang 19
3.3 Analisis Pencapaian Kinerja 20
3.4 Sasaran Rencana Strategis 30
3.5 Sasaran 1 32
3.6 Jumlah Konflik 33
3.7 Data Kejadian Konflik 33
3.8 Jumlah Kerusuhan Bermotif SARA 34

3.9 Data Kejadian Kerusuhan Bermotif SARA 34
3.10 Data Pertemuan antar umat beragama 35
3.11 Sasaran 2 38
3.12 Jumlah peserta program pendidikan politik masyarakat.....39
3.13 Nilai Triwulanan SKM Tahun 2018 40
3.14 Indikator Pencapaian Sasaran SKM Tahun 2018 40
3.15 Realisasi APBD Tahun 2018 40
3.16 Realisasi Belanja Tidak Langsung.....41
3.17 Realisasi Belanja Langsung 41

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan good governance yang merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk menampung dan melaksanakan aspirasi masyarakat demi mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Instruksi Presiden tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara mulai dari Pejabat eselon II keatas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta wewenang pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa Politikdan Politik Kota Malang maka dalam rangka pelaksanaan

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan membuat laporan setiap tahun.

DASAR HUKUM

1. TAP MPR Nomor XI /MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
10. Surat Edaran Mendagri Tgl. 30 OKT 2017 NO. 050.12/7765/SJ Tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas seorang atau pemimpin kolektif lembaga / instansi kepada walikota sebagai pemberi amanah / mandat. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik sekaligus sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang disampaikan secara periodik dan bermanfaat untuk:

a. Mengetahui dan menilai Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya di bidang kepegawaian.

b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, yaitu :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Sub Bagian Umum

c. Bidang Politik Dan Hubungan Antar Lembaga

Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga melaksanakan tugas pokok pengembangan politik dan hubungan antar lembaga serta melakukan koordinasi dalam rangka penetapan kebijakan operasional di bidang pengembangan politik dan kemasyarakatan. Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga membawahi :

1. Subbidang Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Subbidang Lembaga Kemasyarakatan

d. Bidang Integrasi Bangsa

Bidang Integrasi Bangsa melaksanakan tugas pokok pengembangan ideologi, wawasan kebangsaan, pembauran dan bela negara. Bidang Integrasi Bangsa membawahi :

1. Subbidang Wawasan Kebangsaan;
2. Subbidang Pembauran

e. Bidang Kewaspadaan Daerah

Bidang Kewaspadaan Daerah melaksanakan tugas pokok koordinasi dan pemberian fasilitasi dalam penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan inteltrantib serta kajian strategis masalah aktual dalam rangka kewaspadaan daerah. Bidang Kewaspadaan Daerah membawahi :

1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam);
2. Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik

C. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

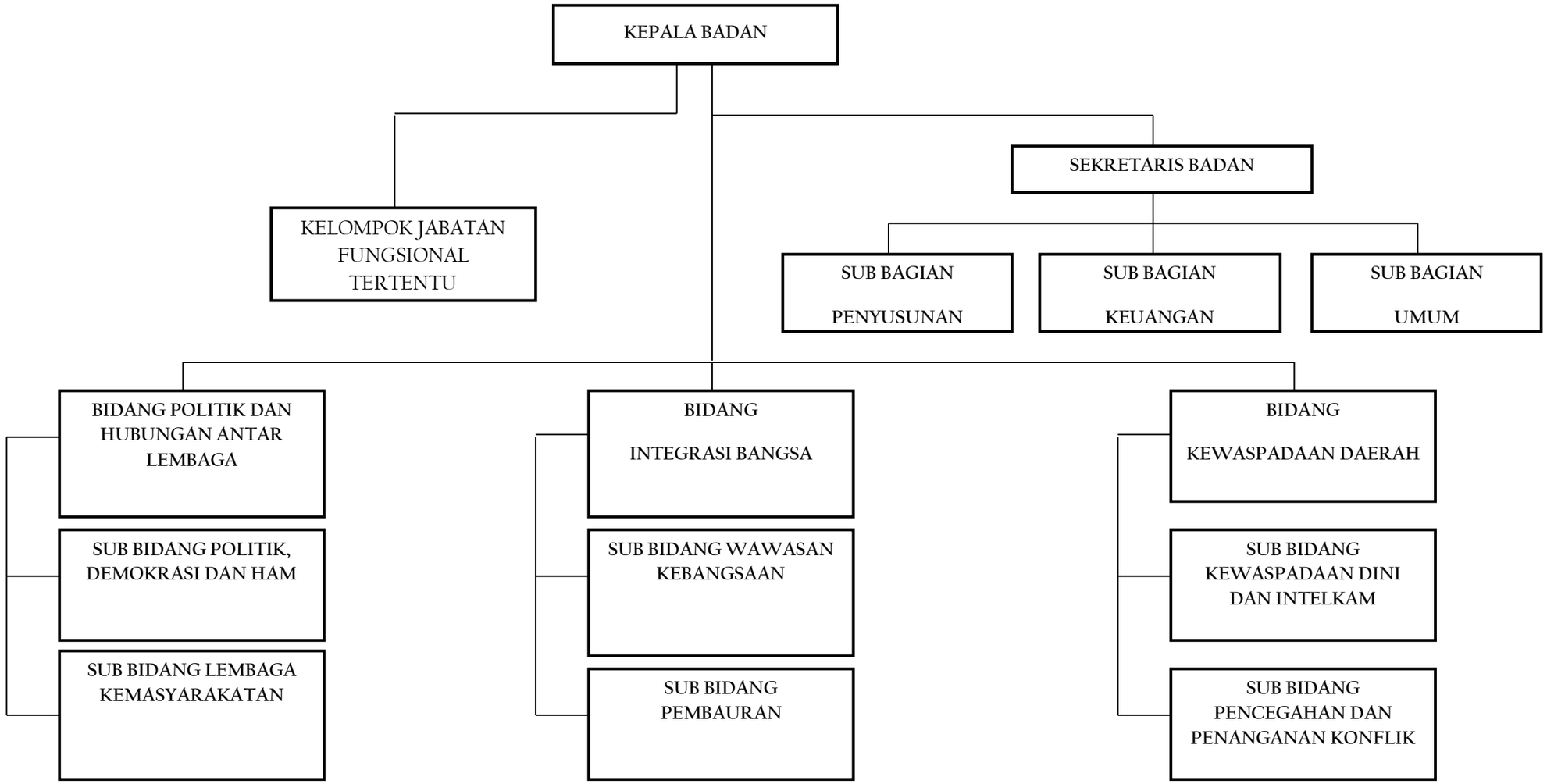

Berdasarkan struktur organisasi di atas untuk Bidang Penanggulangan Bencana sudah tidak ada, karena bidang tersebut telah digabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LAKIP Tahun 2018 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMD TAHUN 2013 – 2018

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembanunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerahini disusun seecara berjenjang untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dalam suatu sistematika dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah,

lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses pembangunan nasional merupakan suatukegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program, kegiatan program, pengawasan sampai pada program terselesaikan diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018 yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tiap tahunnya. Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
2. Alat atau instrument monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Instrumen pengukur tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah selama 5 tahun dan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018 adalah tahapan perencanaan lima tahunan yang merupakan periode ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005 – 2025.

B. RENCANA STRATEGIS 2013 – 2018

Rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2013 – 2018 disusun sebagai perencanaan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis, dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang.

Untuk memberikan gambaran tentang kondisi ideal perlu disusun visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang sebagai rambu-rambu dalam pembangunan pembangunan di Kota Malang pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. **VISI :**

   "*Terwujudnya Masyarakat Kota Malang yang Tentram, Berwawasan Kebangsaan dan Demokratis"*

2. **MISI :**

   Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, maka Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2013 – 2018 adalah: "*Meningkatkan Ketentraman dengan Pemahaman dan Pelaksanaan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan"*

3. **TUJUAN :**

   Dengan didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai hingga tahun 2018, yaitu: *"Terwujudnya Ketentraman Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila"*

4. **SASARAN :**

   Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang disusun berdasarkan tujuan strategis yang ingin dicapai. Ada tiga sasaran strategis yang

ditempuh dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

1) *Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban;*
2) *Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat;*
3) *Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang bangsa dan politik.*

5. INDIKATOR KINERJA :

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2013 – 2018. Indikator kinerja ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang digunakan untuk periode 2013 – 2018 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya Ketentraman Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	1. Prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi 2. Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan 3. Prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindak lanjuti
	2. Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	1. Prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif 2. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 3. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden 4. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Gubernur 5. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Walikota

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolak ukur pengukuran capaian kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang menyusun penetapan kinerja tahun 2018 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya Ketentraman Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	1. Prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi	100%
		2. Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan	100%
		3. Prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindak lanjuti	100%
	2. Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	1. Prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	0%
		2. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif	0%
		3. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden	0%
		4. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Gubernur	60%
		5. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Walikota	60%
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik	72.5

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUATAN IMPLEMENTASI SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dengan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Badan Kesatuan Bangsa dan Poliyik Kota Malang berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kerja di lingkungannya melalui upaya penguatan terhadap implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 24, pasal 27, dan pasal 30 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Tabel 3.1

Tabel Perhitungan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Nilai Realisasi Tahun 2018
1. Prosentase jumlahkonflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi	*Jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang dimediasi dalam setahun* DIBAGI *Jumlah seluruh konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang terjadi* DIKALIKAN 100%	5 konflik x 100% 5 konflik =100%
2. Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan	*Jumlah kerusuhan yang diselesaikan* DIBAGI *Jumlah kerusuhan* DIKALIKAN 100%	1 kerusuhan x 100% 1 kerusuhan =100%
3. Prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindak lanjuti	*Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindak lanjuti* DIBAGI *Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar umat*	62 kali x 100% 64 kali = 96.88%

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Nilai Realisasi Tahun 2018
	beragama DIKALIKAN 100%	
4. Prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	*Jumlah anggota DPRD perempuan* DIBAGI *Jumlah seluruh anggota DPRD* DIKALIKAN 100%	0%*
5. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif	*Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif* DIBAGI *Jumlah total pemilih* *DIKALIKAN 100%*	0%*
6. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden	*Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres* DIBAGI *Jumlah total pemilih* DIKALIKAN 100%	0%*
7. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Gubernur	*Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Gubernur* DIBAGI *Jumlah total pemilih* DIKALIKAN 100%	66.35%
8. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Walikota	*Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada* DIBAGI *Jumlah total pemilih* DIKALIKAN 100%	66.23%
9. Nilai survey kepuasan masyarakat	*Nilai survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*	82.68

Tabel 3.2

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang TA. 2018 yaitu:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya ketentraman berdasarkan nilai-nilai Ideologi Pancasila	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	1. Prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi	100%	100%	100%
		2. Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%
		3. Prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindak lanjuti	100%	96.88%	96.88%
	2. Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	1. Prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	0%	0% *	100%
		2. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif	0%	0% *	100%
		3. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden	0%	0% *	100%
		4. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Gubernur	60%	66.35%	110.58%
		5. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Walikota	60%	66.23%	110.38%
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.5	82.68	114,04%

*:Tidak ada Pemilu

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja dan penetapan capaian indicator kinerja dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Analisis Capaian Kinerja

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban				
	I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
	1. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Terdapat dua permasalahan yang belum selesai yaitu terkait tempat Ibadah Gereja Mawar Sharon dan Rumah Ibadah Yehuwa		96.88%
	2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar nasional	Peserta upacara masih kurang memenuhi sesuai permintaan yaitu satu pleton peserta upacara	Harus segera merekrut Kader Bela Negara, karena sudah banyak yang bekerja	53%
	3. Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan	Nihil	Nihil	96%
	4. Fasilitasi Kader Bela	Nihil	Nihil	48%

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	Negara			
	5. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Masih belum terbentuknya Tim PPWK sehingga program belum dapat berjalan dengan maksimal, tim masih dalam penyusunan	Akan segera dibentuk tim PPWK	91%
	6. Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Nihil	Nihil	100%
	7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	Nihil	Nihil	80%
	8. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Kinerja pengurus Forum Pembauran Kebangsaan massih belum maksimal, masih perlu pengkajian ulang tentang penempatan personil di FPK	Akan dilakukan perubahan kepengurusan dan mencari tokoh daerah lain untuk sebagai pengurus	100%
	9. Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	1. Masih belum terbentuknya gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental sehingga program belum dapat berjalan dengan maksimal. 2. Gugus tugas masih dalam proses penyusunan	1. Akan segera dilakukan pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	100%
	II. Progam Kewaspadaan			

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	Daerah			
	10. Fasilitasi Kominda	Terbitnya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah mengalihkan kegiatan Kominda kepada BIN	1. Mengurangi kegiatan Kominda pada tahun 2018 2. Berkonsultasi dan berkoordinasi pada Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri	100%
	11. Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terbitnya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	1. Mulai menyesuaikan kegiatan FKDM tahun 2018 dengan aturan yang ada 2. Berkonsultasi dan berkoordinasi pada Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri	100%
	12. Fasilitasi FORKOPIMDA	Pada triwulan I S/D Triwulan III terjadi masalah hukum di Kota Malang sehingga ada beberapa bulan yang terjadi kekosongan kepala daerah yang menyebabkan tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Forkopimda	1. Menyesuaikan degan kondisi Kota Malang 2. Menyesuaikan dengan agenda kegiatan pimpinan daerah	80%
	13. Pemantauan Orang Asing, NGO, Mahasiswa dan	1. Kurang maksimalnya Tim Pemantau NGO	1. Kegiatan Pemantauan NGO bisa dimasukkan	75%

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	Lembaga Asing	2. Terjadinya 2 instansi sebagai pelaksana (Bakesbangpol dan Kantor Imigrasi) Double orang dalam Tim pada sau kegiatan yang mana Kepala Bakesbangpol pada Tim Pora sebagai wakil ketua	pada kegiatan Pemantauan Hari Besar dan Kegiatan Penanganan Gangguan Konflik 2. Honor Tim Pemantauan NGO tidak diserap 3. Pada tahun 2019 kegiatan NGO tidak dianggarkan	
	14. Pemantauan Tempat Umum Pada Hari Besar	Beberapa *stakeholder* juga melakukan kegiatan yang hampir sama	Melakukan kegiatan yang benar-benar *urgent* dan merupakan tupoksi Bakesbangpol pada hal-hal tertentu (Terkait surat himbauan/ edaran pada hari-hari besar)	42%
	15. Penanganan Gangguan Konflik Sosial	1. Keterbatasan waktu pengesahan perubahan anggaran 2018 sehingga target kurang maksimal 2. Perubahan SK Tim Penanganan Gangguan Konflik Sosial berpengaruh pada serapan anggaran	1. Pemadatan jadwal kegiatan 2. Melibatkan jajaran linier	100%

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat				
	III. Program Pendidikan Politik masyarakat			
	16. Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	1. Honorarium panitia Ranham dalam DPA tidak mengakomodisikan seluruh panitia Ranham yang tercantum dalam SK Walikota sehingga hanya sebagian yang dapat honor 2. Kurangnya informasi yang akurat terkait daftar OPD yang mendapat honor kepanitiaan di kegiatan Ranham yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum, untuk itu Bakesbangpol mencatat OPD yang telah menerima honor untuk	Kegiatan Ranham harus koordinasi dengan Bagian Hukum untuk menghindari Double Account (pemberian ganda) honor untuk satu orang	100%

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
		menghindari penerimaan ganda, alasan Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan seperti juga Bakesbangpol yaitu kegiatan Ranham.		
	17. Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	1. Kurangnya pemahaman pengurus partai politik khususnya yang bertugas menangani bantuan parpol. 2. Adanya konflik internal Partai Nasdem yang tidak tertib administrasi, sehingga berakibat tidak dapat bantuan dana keuangan parpol sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.	Adanya pendampingan yang dilakukan oleh Tim Khusus pendampingan dengan cara mendampingi Parpol, baik proses awal proposal sampai pembuatan LPJ dan verifikasinya.	100%
	18. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu	Partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini masih rendah dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada pagi hari yang menyebabkan masyarakat banyak yang kurang berminat	Seharusnya kegiatan ini dilaksanakan pada hari libur, sehingga banyak masyarakat yang menghadiri	100%

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
		untuk mengikuti kegiatan ini		
	19. Fasilitasi pendidikan Politik Bagi Generasi Muda	1. Belum maksimalnya koordinasi antara pihak penyelenggara kegiatan dengan cabang Dinas Pendidikan wilayah Kota Malang dan Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan sekolah-sekolah yang dilibatkan 2. Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan karena berbenturan dengan pelaksanaan Ujian Sekolah Nasional 3. Adanya kesalahpahaman pihak cabang Dinas Kota Malang dengan Kota Batu terhadap kegiatan Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda 4. Belum maksimalnya partisipasi dari SMA/ SMK/MA karena pelaksanaan kegiatan	Mengadakan penjadwalan pelaksanaan kegiatan, dan dicarikan hari yang tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah	100%

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
		berbenturan ujian sekolah		
	IV. Program Pemberdayaan Ormas dan LSM			
	20. Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	Belum ada pemutakhiran data Ormas di Bakesbangpol Kota Malang sampai dengan Tahun 2018, mengingat aturan lama (UU Nomor 8 Tahun 1985) dan Peraturan Pelaksananya, mengamanahkan berlakunya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bagi ormas selama 5 tahun	Sebelum menentukan peserta kegiatan, dialkukan pemberitahuan dan penyampaian Surat Kesediaan Hadir bagi Ormas	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik				
	V. Program pelayanan administrasi perkantoran			
	21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nihil	Nihil	100%
	22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kekurangan daya listrik	Dianggarkan di PAK	100%
	23. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor tenaga jasa kebersihan, penjaga kantor dan sopir tidakmaksimal sehingga pada bulan Desember pekerjaan	Pada tahun berikutnya tenaga kebesihan dan keamanan kantor diberikan honorarium selama 12 bulan karena	100%

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
		kebersihan dan keamanan kantor terbengkalai	merupakan pekerjaan rutin	
	24. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nihil	Nihil	100%
	25. Penyediaan Makanan dan Minuman	Nihil	Nihil	100%
	26. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Nihil	Nihil	74%
	27. Peringatan/Kegiatan Insidentil	Dua event yang diperkirakan akan dilaksanakan ternyata satu event tidak dilaksanakan		50%
	28. Pengelolan Perpustakaan dan Arsip	Nihil	Nihil	83%
	VI. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
	29. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kesulitan mencari rekanan untuk pengadaan peralatan dengan nilai kecil yang merupakan kelengkapan peralatan utama	Untuk ke depan penganggaran kelengkapan peralatan disatukan	75%
	30. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Nihil	Nihil	100%

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	31. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Nihil	Nihil	100%
	32. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Nihil	Nihil	100%
	VII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan			
	33. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pembayaran honor tim tidak maksimal karena dana tersedia tidak sama dengan susunan di SBU	Honor diserap sesuai dengan SBU	100%
	34. Penyusunan/Reviu Renstra			100%
	35. Penyusunan laporan keuangan	NIHIL	NIHIL	100%

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, Bakesbangpol Kota Malang telah menyelenggarakan Pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 3 sasaran yang telah direncanakan. Dengan demikian pencapaian sasaran untuk Tahun 2018 secara umum sesuai dengan yang telah tercantum pada Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap setiap sasaran dalam Rencana Strategis yang dimaksud dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Sasaran Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pencapaian	
						Tercapai	Tidak Tercapai
Terwujudnya ketentraman berdasarkan nilai-nilai Ideologi Pancasila	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	1. Prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi	100%	100%	100%	√	
		2. Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	√	
		3. Prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindak lanjuti	100%	96.88%	96.88%		√
	2. Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	1. Prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	0%	0% *	100%	√	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pencapaian	
						Tercapai	Tidak Tercapai
		2. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif	0%	0% *	100%	√	
		3. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden	0%	0% *	100%	√	
		4. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Gubernur	60%	66.35%	110.58%	√	
		5. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Walikota	60%	66.23%	110.38%	√	
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.5	82.68	114,04%	√	

Keterangan:

*:Tidak ada Pemilu

Untuk lebih jelasnya dari pencapaian sasaran tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

SASARAN I:

"Meningkatnya peran serta masyarakat dalam megamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban"

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan sasaran ini beserta target dan pencapaian pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Satuan	Jumlah			
1.	Prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi	%	100	100%	100%	Tercapai
2.	Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan	%	100	100%	100%	Tercapai
3.	Prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindak lanjuti	%	100	96.88%	96.88%	Tidak Tercapai

Penjelasan capaian indikator kinerja dalam Sasaran I, sebagai berikut:

1. Dalam hal pencapaian indikator ***"Prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi"*** pada tahun 2018 mencapai 100%. Dengan demikian, berdasarkan tabel diatas menunjukkan predikat "**tercapai**". Capaian ini sesuai dengan target tahun 2018 yang ditentukan yaitu 100%.

Uraian prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar/ mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi selama tahun 2018, sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar/ mahasiswa, dan antar kampung) yang dimediasi dalam setahun}}{\text{jumlah seluruh konflik (antar kelompok pemuda, pelajar/ mahasiswa, dan antar kampung) yang terjadi}} X\ 100\%$$

$$\frac{5\ \text{konflik}}{5\ \text{konflik}} X\ 100\%$$

$$=100\%$$

Jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi selama tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.6

No	Kejadian	Bulan												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Konflik	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	5
JUMLAH														**5**

Data kejadian konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi selama tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.7

No	Tanggal	Lokasi Konflik	Yang Terlibat	Permasalahan	Solusi
1.	Januari 2018		Buruh	Permasalahan Buruh yang melakukan demonstrasi karena terjadi pemutusan kerja sepihak	- Pemantauan
2.	April 2018			Salah paham dalam hubungan pacaran	- Pemantauan
3.	April 2018		Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)	Kepentingan kelompok antar daerah asal Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)	- Pemantauan
4.	1 Juli 2018		Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan masyarakat	Kerusuhan yang terjadi antara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan masyarakat terkait jawaban dari senior Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)	- Monitoring pasca terjadinya konflik
5.	15 Agustus 2018	Jl. Sulawesi No.16, Kasin, Klojen, Kota Malang (belakang RSI Malang)	Pelajar SMA 2 Malang	Bentrok antar pelajar	- Pemantauan

2. Dalam hal pencapaian indikator ***" Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan"*** pada tahun 2018 mencapai 100%. Dengan demikian, berdasarkan tabel diatas menunjukkan predikat "**tercapai**". Capaian ini sesuai dengan target tahun 2018 yang ditentukan yaitu 100%.

   Uraian prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan pada tahun 2018, sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah kerusuhan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kerusuhan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ kerusuhan}}{1 \text{ kerusuhan}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Uraian jumlah kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan selama tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.8

No	Kejadian	Bulan												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Kerusuhan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
JUMLAH														1

Data kejadian kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan selama tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.9

No	Tanggal	Lokasi Kerusuhan	Yang Terlibat	Permasalahan	Solusi
1.	Agustus 2018		Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)	Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut merdeka dari Indonesia dan pembebasan militerisasi	- Pemantauan

3. Dalam hal pencapaian indikator ***"Prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindak lanjuti"*** pada tahun 2018 yaitu 96.88%. Dengan demikian, berdasarkan tabel diatas menunjukkan predikat **"tidak tercapai".** Capaian ini kurang dari target tahun 2018 yang ditentukan yaitu 100%. Indikator tersebut tidak tercapai disebabkan oleh belum terselesaikannya dua permasalahan yaitu terkait tempat Ibadah Gereja Mawar Sharon dan Rumah Ibadah Yehuwa (izin penempatan sementara ruko sebagai tempat ibadah)

   Uraian prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindak lanjuti selama tahun 2018, sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ kesepakatan\ hasil\ pertemuan\ antar\ umat\ beragama\ yang\ ditindak\ lanjuti}{Jumlah\ kesepakatan\ hasil\ pertemuan\ antar\ umat\ beragama} X100\ \%$$

$\frac{62\ kali}{64\ kali} X100\ \%$

= 96.88%

Data pertemuan antar umat beragama Tahun 2018

Tabel 3.10

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat / pelaksana
1.	27/01/2018	Ulang tahun Vihara Mettadipa	Jl. Mahoni No. 5 Malang. Pkl. 18.30 s/d selesai
2.	12/02/2018	Rapat koordinasi dengan jajaran Kelurahan Sukoharjo	Di Ruang PKK Kelurahan Sukoharjo pkl. 19.00 s.d selesai
3.	14/02/2018	Rapat Pengamanan Imlek 2018	Di Ruang Rapat Bakesbangpol kota Malang. Pkl. 13.00 s/d selesai
4.	16/02/2018	Rapat Koordinasi FKUB	Di rumah Sekretaris FKUB Kota Malang. Pkl. 13.00 s/d selesai
5.	18/02/2018	Perayaan Imlek Vihara Dharma Mitra	Di Green Leaf Resto pkl. 17.00 s/d selesai
6.	19/02/2018	Audiensi dan tatap muka bersama Kapolres Malang Kota	Di Mapolsek Klojen Jl. Kelud No 11 Malang, pkl. 12.30
7.	21/02/2018	Dialog dengan Ulama dan Umaro' se Jatim	Di Polda Surabaya pkl. 10.00 s/d selesai (P. Taufiq)
8.	***13/03/2018***	***Rapat Koordinasi dengan Perwakilan Gereja Bethany dan Mawar Sharon***	***Di Rumah Ketua FKUB Kota Malang Jl Jombang I/64 pkl 16.00 s/d selesai***
9.	14/03/2018	Koordinasi dan Sinergitas Penanggulangan Gangguan di Kota Malang	Di Grand Cakra Hotel Araya pkl 19.00 s.d selesai
10.	16/03/2018	Rapat Koordinasi Dengan FKDM Kota Malang	Di Ruang Rapat Bakesbangpol Kota Malang. Jl. A. Yani 98 pkl. 13.30 s/d selesai
11.	27/03/2018	Sosialisasi Permendagri No. 2 Tahun 2018	Di Aria Gajayana Hotel Pkl. 18.30 s.d selesai
12.	28/03/2018	Dialog Publik	Di Regent Park Hotel pkl. 09.00 s.d selesai
13.	04/04/2018	Dialog Lintas Agama	Di MAN 1 Malang Jl. Baiduri Bulan No. 40 Malang Pkl. 08.00 s.d Selesai
14.	13/04/2018	Dialog dengan Watimpres Bpk. Malik Fajar	Di Rektorat Kampus III UMM Kota Malang pkl. 15.00 s.d selesai
15.	20/04/2018	Koordinasi dengan Instansi terkait dan Gereja Mawar Sharon	Di Aula Kecamatan Klojen Kota Malang pkl. 13.30 s.d selesai
16.	30/04/2018	Rapat koordinasi tentang Hibah	Di Ruang Nusantara Pemkot Malang Pkl. 09.30 s.d selesai. P. taufiq. P. stefanus, b. mamiek, P. Bagus
17.	30/04/2018	Koordinasi tentang persiapan menyambut ramadhan dan idul fitri	Di ruang Staff Ahli Pemkot Malang pkl. 12.30 s.d selesai
18.	04/05/2018	FGD dalam menyambut Bulan suci Ramadhan	Di regent park hotel Jl. Jaksa Agung Suprapto. 18.30 s.d selesai
19.	08/05/2018	Sosialisasi Pengumuman dalam menyambut bulan Ramadhan	Di Atria Hotel Jl. Letjen S. Parman No. 87-89 Malang Pkl. 18.00 s.d selesai
20.	11/05/2018	Rapat koordinasi dengan Bakesbangpol	Di Ruang Rapat Bakesbangpol Kota Malang pkl. 13.00 s.d selesai

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat / pelaksana
21.	13/05/2018	Rapat koordinasi FKUB se-Jawa Timur	Di Hotel Sahid Jl. Sumatera No. 1-15 Surabaya
22.	15/05/2018	Sosisalisasi bantuan Sosial Keagamaan Kota Malang	Di Hotel Regent Park Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 12-16 Malang pkl. 08.00
23.	16/05/2018	Pengukuhan Tim Koordinasi Pengawaas Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Kota malang	Di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang Pkl. 09.00 s.d selesai
24.	18/05/2018	Pemantauan tempat hiburan selama bulan Ramadhan	Start Kantor Bakesbangpol Kota Malang Jl. A. Yani 98 Malang Pkl. 15.00
25.	22/05/2018	Koordinasi Pemantapan persiapan "Malang kondusif"	Di Ruang Tumapel Balaikota Malang, Jl. Tugu No. 1 Malang. Pkl. 09.00
26.	22/06/2018	Rapat Koordinasi FKUB Kota Malang dan Halal Bi Halal	Di Rumah Ketua FKUB Kota Malang Jl. Jombang I/64 Malang.
27.	10/07/2018	Verifikasi Gereja Bethany Tidar	Jl Telaga Bodas Tidar-Malang pkl 11.30 s/d 15.30
28.	11/07/2018	Audensi dengan Walikota Malang	Di Ruang Rapat Walikota Malang Jl. Tugu No. 1 Malang. Pkl. 12.00 s.d selesai
29.	12/07/2018	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Di Hotel Regent Park Jl. J.A. Agung Suprapto No. 12-16 Malang pkl 08.00 s.d selesai.
30.	22/07/2018	Undangan sosialisasi pendirian gereja Bethany Indonesia Rock	Di Balai RW 5 Kelurahan Pisang Candi Jl. Pisang agung V/22 Malang. Pkl. 19.00 s.d selesai
31.	23/07/2018	Dialog dengan Dekenat Kota Malang	Di Gedung Unio Jl. Jaksa Agung Suprapto 75 Kota Malang. Pkl. 19.00 s.d selesai
32.	24/07/2018	Dialog dengan PGIS Kota Malang	Di Gereja GPIB Immanuel Jl. AR Hakim No. 1 Malang pkl 19.00 s.d selesai
33.	07/08/2018	Dialog dan Silaturrahim dengan Khong hu cu	Di Klenteng Eng An Kiong Jl. Martadinata No. 1 Malang Pkl. 19.00 s.d selesai
34.	13/08/2018	Rapat Koordinasi dengan Asisten 2	Di Balaikota Malang pkl. 15.00
35.	16/08/2018	Verifikasi Masjid Ibnu Sina	Jl. Veteran Pkl. 10.00 s.d selesai
36.	25/08/2018	Sarasehan pemuda KUB	Di PDM Jl. Gajayana 28B pkl. 09.00
37.	04/09/2018	Dialog Bamag	Di Jl. Dirgantara II No. 29-30 Malang pkl. 19.00
38.	08/09/2018	Dialog dengan MUI	Di Ged. Kartini Jl. Tangkuban Perahu pkl. 10.00
39.	14/09/2018	Rapat koordinasi dengan instansi terkait	Di Gedung Unio Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 75 Malang Pkl. 13.30 s.d selesai
40.	21/09/2018	Verifikasi Tempat Ibadah Mushola Attawwabun	Jl. Sarangan Atas No 33 Malang Pkl. 13.30 s.d selesai
41.	26/09/2018	Forum Konsultasi Publik	Di Hotel Olino Garden Jl. Aris Munandar 41-45 pkl. 09.45
42.	26/09/2018	Sosialisasi di Kelurahan Tanjungrejo	Aula Kelurahan Tanjungrejo Jl. Ters Mergan Raya No. 1 Malang pkl. 19.00 s.d selesai
43.	28/09/2018	Sosialisasi di Kelurahan Sukoharjo	Aula Kelurahan Sukoharjo Jl. Aris Munandar 54 Malang pkl.
44.	30/9/2018	Koordinasi Sinergitas Forkompimda Kota	Di Kantor Bakesbangpol Kota Malang Jl. A. Yani 98

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat / pelaksana
		Malang	Malag Pkl. 09.00 s.d selesai
45.	05/10/2018	Penerimaan Kunjungan LDII Kota Malang	Di Sekretriat FKUB Kota Malang pkl. 15.30 s.d selesai
46.	09/10/2018	Audiency dengan Wakil Walikota Malang	Di Ruang Rapat Wakil Walikota Malang Jl. Tugu No. 1 pkl 10.00 s.d selesai
47.	10/10/2018	Verifikasi tempat ibadah	Masjid Al Hikmah Jl. I.R Rais Gg 3 Malang pkl. 15.00 s.d selesai (p. taufiq, p. stefanus, p. agus, p. nugroho, p. bintarto, p. hariono, p. Hendrik)
48.	20/10/2018	HUT Klenteng	Di Klenteng Eng An Kiong Jl. Martadinata No. 1 Malang pkl. 18.30 s.d seleasi (P. Nug dan P. Hendrik)
49.	24/10/2018	Koordinasi dengan OMBUDSMAN RI	Di Ruang Rapat Kemenag Kota Malang pkl. 13.00 s/d selesai (P.Taufiq, P. Nursalim, P. Stefanus, P. Hendrik, P. Bagus, P. Nugroho, P. hariono, P. Bintarto)
50.	24/10/2018	Verifikasi tempat ibadah	Masjid Ramadhan Jl. Pondok Blimbing Indah pkl. 13.00 s.d selesai (p. taufiq, p. nur, p. baroni, p. agus, p. ida bagus, p. hariono, p. bintarto)
51.	25/10/2018	Coffe Morning Kapolres Malang Kota dengan Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda	Di Mapolres Malang Kota Jl. Jagung Suprapto No. 19 Malang pkl. 08.30 s.d selesai (P. taufiq)
52.	28/10/2018	Pemantauan aksi bela tauhid	Di depan Masjid Jami' Kota Malang pkl. 04.00 (p. taufiq)
53.	08/11/2018	Sosialisasi Gadingkasri	Di Aula Kantor Kelurahan Gadingkasri Jl. Galunggung No. 5 Malang (p. taufiq, p. nur, p. baroni, p. agus, p. nugroho, p. bagus, p. bintarto, p. Hendrik)
54.	14/11/2018	Dialog dengan kodim	Di Makorem 083 Jl. Bromo pkl. 07.45 s.d selesai (P. Nur, P. nugroho, p. hariono, p. Hendrik)
55.	03/12/2018	Rapat Koordinasi PAKEM	Di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang pkl. 11.00 (p. taufiq)
56.	04/12/2018	Sarasehan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Di UNMER Malang
57.	***06/12/2018***	***Pertemuan dengan Ketua DP-FKUB (masalah ijin tempat ibadah Yehuwa)***	***Di ruang Wakil Walikota Malang pkl. 08.30***
58.	07/12/2018	Sosialisasi Perundang-Undangan KUB	Di Aula Kelurahan Kasin Jl. Nusakambangan 1 Malang pkl. 19.00 s.d selesai
59.	10/12/2018	Dialog Dengan FKDM	Di Ruang Rapat Bakesbangpol Kota Malang Jl. A. Yani 98 Malang pkl. 19.00
60.	11/12/2018	Rapat Koordinasi dengan DP-FKUB dan Instansi Terkait	Di Edotel SMKN 2 Malang Jl. Veteran Pkl. 09.00 s.d selesai
61.	12/12/2018	Sosialisasi Perundang-Undangan KUB	Di Aula Kel. Kebonsari Jl. S. Supriyadi 15 Malang Pkl. 19.00
62.	14/12/2018	Dialog dengan BMGK kota Malang	Di Jl. Ciliwung 5N Malang pkl. 19.00
63.	18/12/2018	Dialog Dengan KNPI Kota Malang.	Di Kantor KNPI Jl. Kawi Malang pkl. 19.15
64.	23/12/2018	Koordinasi dengan Walikota Malang	Di Ruang Walikota Malang pkl. 08.30

SASARAN II :

"Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat"

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan sassaran ini beserta target dan pencapaian pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Satuan	Jumlah			
1.	Prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	%	0	0 *	100%	Tercapai
2.	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif	%	0	0 *	100%	Tercapai
3.	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden	%	0	0 *	100%	Tercapai
4.	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Gubernur	%	60	66.35%	110.58%	Tercapai
5.	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Walikota	%	60	66.23%	110.38%	Tercapai

Keterangan:

*:Tidak ada Pemilu

Penjelasan capaian indikator kinerja dalam Sasaran II, sebagai berikut:

1. Dalam hal pencapaian indikator kinerja tersebut memiliki target 0% dan realisasi 0%. Hal itu dikarenakan Kota Malang tidak menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, hanya Pemilu Gubernur dan Pemilu Walikota, dengan demikian berdasarkan tabel di atas menunjukkan predikat **"tercapai"**, akan tetapi untuk mendukung indikator dimaksud diadakan kegiatan antara lain seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12

Jumlah Peserta Program Pendidikan Politik Masyarakat

No	Kegiatan	Bulan												TOTAL
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia									100 org				100 Org
2	Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol		27 org									65 org	65 org	157 org
3	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu			846 org	562 org							370 org		1778 org
4	Fasilitasi pendidikan Politik Bagi Generasi Muda		589 org										385 org	974 org
Jumlah														**3.009 org**

<u>SASARAN III</u> :

"Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang bangsa dan politik"

Untuk mengukur kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka dilaksanakan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2018 dengan mengambil responden sebanyak 300 orang. Sebagaimana diketahui, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Survey kepuasan masyarakat pada Tahun 2018, dilaksanakan setiap Triwulanan, dengan hasil sebagai berikut

Tabel 3.13

Nilai triwulanan survey kepuasan masyarakat tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Triwulan I [a)]	Triwulan II [b)]	Triwulan III [c)]	Triwulan IV [d)]	Jumlah
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	41,30	41,41	41,27	41,40	$\frac{165.37}{2\ Semester} = 82.68$

Keterangan :

[a)] jumlah responden survey di Triwulan I, yaitu: 75 orang

[b)] jumlah responden survey di Triwulan II, yaitu 75 orang

[c)] jumlah responden survey di Triwulan III, yaitu 75 orang

[d)] jumlah responden survey di Triwulan IV, yaitu 75 orang

Jadi total responden survey selama tahun 2018 adalah 300 orang

Tabel 3.14

Indikator pencapaian sasaran ini beserta targetnya pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Satuan	Jumlah			
1.	Nilai survey kepuasan masyarakat	nilai	72.5	82,68	114,04%	Tercapai

Dalam hal pencapaian indikator ***"Nilai survey kepuasan masyarakat"*** pada tahun 2018 mencapai 82,68. Dengan demikian, berdasarkan tabel diatas menunjukkan predikat "**tercapai"**. Capaian ini melebihi dari target tahun 2018 yang ditentukan yaitu 72,5.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15

No	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI		SELISIH	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1.	Belanja Tidak Langsung	3.475.509.417,00	2.968.007.417,00	85,40 %	507.502.000,00	14,6 %
2.	Belanja Langsung	9.021.210.000,00	6.764.323.418,00	74,98 %	2.256.886.582,00	25,02 %
	Belanja Daerah	**12.496.719.417,00**	**9.732.330.835,00**	**77,88** %	**2.764.388.582**	**22,12**

<u>Rincian Belanja Daerah</u>

a. Belanja Tidak Langsung :

Tabel 3.16

No	K E G I A T A N	ANGGARAN	REALISASI		SELISIH	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	3.475.509.417,00	2.968.007.417,00	85,40 %	507.502.000,00	14,6 %
	Jumlah	**3.475.509.417,00**	**2.968.007.417,00**	**85,40 %**	**507.502.000,00**	**14,6 %**

b. Belanja Langsung

Tabel 3.17

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SELISIH	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	350,000,000	297,727,526	85.07%	52,272,474	14.93%
2.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar nasional	78,500,000	20,550,000	26.18%	57,950,000	73.82%
3.	Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan	85,000,000	74,780,000	87.98%	10,220,000	12.02%
4.	Fasilitasi Kader Bela Negara	136,200,000	68,576,700	50.35%	67,623,300	49.65%
5.	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	92,940,000	22,240,000	23.93%	70,700,000	76.07%
6.	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	50,000,000	42,920,000	85.84%	7,080,000	14.16%
7.	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	75,000,000	70,950,000	94.60%	4,050,000	5.40%

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SELISIH	
			Rp.	%	Rp.	%
8.	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	135,000,000	68,327,000	50.61%	66,673,000	49.39%
9.	Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	50,000,000	40,176,500	80.35%	9,823,500	19.65%
10.	Fasilitasi Kominda	500,000,000	276,205,650	55.24%	223,794,350	44.76%
11.	Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	1,450,000,000	1,344,795,550	92.74%	105,204,450	7.26%
12.	Fasilitasi FORKOPIMDA	640,010,000	415,793,700	64.97%	224,216,300	35.03%
13.	Pemantauan Orang Asing, NGO, Mahasiswa dan Lembaga Asing	350,000,000	105,104,150	30.03%	244,895,850	69.97%
14.	Pemantauan Tempat Umum Pada Hari Besar	500,000,000	197,811,500	39.56%	302,188,500	60.44%
15.	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	960,700,000	582,180,650	26.18%	378,519,350	73.82%
16.	Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	50,000,000	34,350,000	68.70%	15,650,000	31.30%
17.	Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	47,600,000	38,029,000	79.89%	9,571,000	20.11%
18.	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu	858,616,900	837,806,050	97.58%	20,810,850	2.42%
19.	Fasilitasi pendidikan Politik Bagi Generasi Muda	535,884,000	532,915,400	99.45%	2,968,600	0.55%

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SELISIH	
			Rp.	%	Rp.	%
20.	Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	100,000,000	95,162,200	95.16%	4,837,800	4.84%
21.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89,455,000	83,732,600	93.60%	5,722,400	6.40%
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,500,000	62,281,340	89.61%	7,218,660	10.39%
23.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	162,500,000	161,882,300	99.62%	617,700	0.38%
24.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,900,000	19,304,100	92.36%	1,595,900	7.64%
25.	Penyediaan Makanan dan Minuman	72,630,000	70,287,250	96.77%	2,342,750	3.23%
26.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	442,400,000	261,401,663	59.09%	180,998,337	40.91%
27.	Peringatan/Kegiatan Insidentil	25,000,000	19,356,000	77.42%	5,644,000	22.58%
28.	Pengelolan Perpustakaan dan Arsip	20,000,000	19,046,000	95.23%	954,000	4.77%
29.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	294,025,000	270,480,850	91.99%	23,544,150	8.01%
30.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	175,000,000	135,259,900	77.29%	39,740,100	22.71%
31.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	64,120,000	35,225,500	54.94%	28,894,500	45.06%
32.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	259,499,100	255,062,000	98.29%	4,437,100	1.71%

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SELISIH	
			Rp.	%	Rp.	%
33.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	108,453,000	74,898,113	69.06%	33,554,887	30.94%
34	Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000	39,147,425	26.18%	954,000	73.82%
35.	Penyusunan laporan keuangan	97,277,000	90,556,800	93.09%	6,720,200	6.91%
	JUMLAH	**9,021,210,000**	**6,764,323,418**	**74.98%**	**2,256,886,582**	**25.02%**

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu bentuk komitmen permerintah terhadap tujuan reformasi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang merupakan bagian dari Institusi Pemerintah Daerah menyusun LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang yang baik (good governance). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang telah melakukan banyak hal dan cukup berhasil. Namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan kontekstualisasi persoalan maupun komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.

Mengacu pada 3 sasaran yang dijabarkan dalam 9 indikator kinerja dengan nilai rata-rata mencapai terget, sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar 74.98% maka dapat dikatakan berhasil.

Hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang selama Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

a. Kondisi keamanan di Kota Malang semakin kondusif, hal ini tidak lepas dari pengaruh gejolak nasional maupun regional yang cenderung menurun.
b. Pembekalan materi deteksi dini dinilai perlu ditingkatkan pada tingkat lanjut. Materi ini amat penting bagi Kota Malang daerah yang dinamis dengan latar belakang penduduknya beraneka ragam.
c. Pengkaderan tentang bela negara harus semakin digalakkan terutama dalam mengantisipasi tindakan radikalisme dan meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

B. SARAN

a. Peningkatan peran seluruh komponen bangsa dalam penciptaan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman.
b. Melakukan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai wujud adanya perubahan paradigma.
c. Melakukan sosialisasi program-program Bakesbangpol.

d. Membuat jejaring informasi dengan seluruh komponen masyarakat guna mengantisipasi adanya potensi kerawanan.